

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Menurut Arikunto (2013:172), data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak pendapat dan lain-lain.
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak kedua, biasanya diperoleh melalui instansi yang bergerak dibidang pengumpulan data seperti: Badan Pusat Statistik dan lain-lain.

Berdasarkan definisi di atas, Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh melalui pihak lain. Alasan peneliti menggunakan data sekunder ini adalah data sekunder mempunyai validitas yang dijamin oleh pihak lain sehingga handal untuk digunakan dalam penelitian (Sumarjo, 2010). Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/kota di Lampung serta menggunakan data non keuangan, seperti ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, dan jumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Sumber data LKPD dan data non keuangan yang dikumpulkan diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2015 Oleh BPK RI Melalui Situs www.bpk.go.id.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak kedua (wibesite). Data penelitian yang

dalam penelitian ini di dapat dari situs Badan Pemeriksaan Keuangan RI dan wibesite resmi Pemerintah Daerah.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

(Sugiyono, 2004: 73 pada Lesmana 2010) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi Lampung tahun 2015 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015 populasi penelitian karena laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2015 merupakan implementasi standar akuntansi pemerintah yang berbasis accrual basic.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2009). Penentuan sampel dalam penelitian ini metode terdapat pada laporan keuangan pemerintah daerah dan kota di lampung.. Dalam penelitian ini, pemilihan anggota sampel dalam penelitian ini hanya pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2015 yang memiliki kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dijadikan sampel. Adapun kriteria yang diambil sebagai sampel adalah:

1. Laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Lampung.

Sampel penelitian ini menggunakan laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota yang terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK tahun 2015.

2. Kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang memiliki laporan Jumlah dinas/instansi tahun 2015 yang dipublikasikan BPS.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Sekaran (2006) dalam Sumarjo (2010) menyatakan bahwa variabel merupakan sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat berbeda/berubah. Nilai ini dapat berbeda dalam waktu yang lain untuk objek/orang yang sama atau dapat juga berbeda pada waktu yang sama untuk orang/objek yang berbeda.

Penelitian ini dilakukan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah kabupaten/kota yang diterbitkan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan dari BPK dengan menggunakan data sekunder yaitu data kuantitatif yang terdapat pada LKPD (Dede setiawan, 2014).

3.4.1. Variabel Dependen

3.4.1.1 Variabel Kepatuhan Pengungkapan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemberian informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas pemda/entitas yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan terhadap pengungkapan wajib dari laporan keuangan entitas pelaporan. Pengukuran pengungkapan laporan keuangan dengan menggunakan variabel *dummy*. Nilai 1 (satu) untuk pengungkapan laporan keuangan yang diungkapkan secara penuh pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan lampung dan Nilai 0 (nol) untuk pengungkapan laporan keuangan yang tidak diungkapkan secara penuh pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan lampung dengan menggunakan skala ukur nominal (Dede setiawan, 2014).

3.4.2. Variabel Independen

Variabel independen merupakan salah satu variabel yang mempunyai variabel dependen, baik pengaruh secara positif maupun negative (Sekaran, 2006 dalam Sumarjo, 2010). Variabel independen pada penelitian ini adalah karakteristik Pemerintah Daerah, yaitu ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah,

umur Pemerintah Daerah, belanja daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

a. Ukuran Pemerintah Daerah.

Menurut (Cohen dan Kaimenakis, 2010 dalam yulianingtyas, 2011), ukuran perusahaan/organisasi adalah predictor signifikan untuk kepatuhan akuntansi. Ukuran pemerintahan daerah ini telah banyak dilakukan pada beberpa penelitian (Lesmana, 2010; Yulianingtyas, 2011; Syafitri, 2012; dan Nugroho, 2014). Ukuran dalam sebuah entitas lazimnya digunakan sebagai suatu skala ukur dimana dapat diklasifikasikan ukuran besar kecilnya suatu entitas. Proksi perhitungan untuk variabel ukuran pemerintah daerah pada penelitian ini menggunakan total pendapatan daerah yang dihitung menggunakan logaritma natural dari total pendapatan daerah. Perhitungan ini juga digunakan dalam penelitian yang dilakukan (Suhardjanto, 2010; Yulianingtyas, 2011; dan Syafitri, 2012).

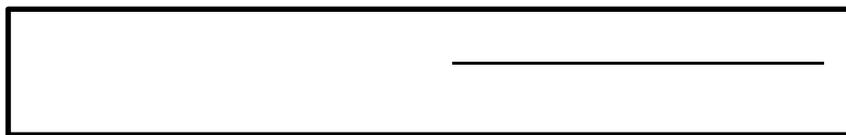
$$\text{SIZE} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

b. Tingkat Kemakmuran Daerah

Menurut permendagri No. 32 Tahun 2008, dalam upaya peningkatan PAD, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib. Abdullah, (2004) dalam Nugroho, (2014) kekayaan (wealth) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(Abdullah, 2004) Kekayaan (wealth) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertimbangan pengukuran kemakmuran dengan PAD ini karena meskipun kecil kontribusi PAD terhadap pemerintah daerah diindonesia (sekitar 1%- 6%), PAD merupakan salah satunya sumber

keuangan yang berasal dari wilayah tersebut (Suhardjanto et al, 2010 dalam Sumarjo, 2010).



c. Status Daerah

Status Daerah adalah suatu otonomi yang diberikan antara pusat kepada daerah dengan dibedakannya antara otonomi yang bersifat khusus dan istimewa untuk diberi kewenangan mengatur daerah kabupaten maupun kota (Nugroho, 2014). Pandangan bahwa status daerah mempengaruhi kelengkapan pengungkapan dikarenakan adanya perbedaan karakteristik masyarakat dan struktur pendapatan yang dapat berimplikasi pada control sosial yang berbeda npula (Abdullah, 2004 dalam yulianingtyas, 2011).

Kontrol sosial pada penduduk kota cenderung lebih kuat, sehingga pemerintah daerah yang berstatus sebagai kota akan cenderung mematuhi standar akuntansi. Status daerah diukur dengan menggunakan skor. Jika status daerah tersebut dikategorikan Kabupaten maka diberi skor 1 (satu) dan jika status daerah tersebut kota maka akan diberi skor 2 (dua). Variabel ini digunakan dalam beberapa penelitian yaitu Retno ningsih, 2009; Yulianingtyas, 2011; dan Nugroho, 2014.

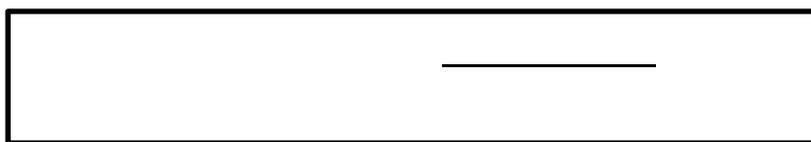
d. Belanja Daerah

Menurut UU No.32 Tahun 2004, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Sedangkan

belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tidak langsung terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Menurut UU No. 32/2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pilihan yang diantaranya berupa pelayanan dasar di bidang pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial.



e. Jumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penggunaan anggaran/barang. Pengukuran jumlah SKPD dalam penelitian ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah.

3.5 Metode Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan kepatuhan pengungkapan pada laporan keuangan

pemerintah daerah kabupaten/kota di Lampung tahun anggaran 2015 dengan menggunakan

regresi linier berganda (*multiple regression linear analysis*). Data tersebut di-run menggunakan software SPSS IBM Statistics 20.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan mean, median, standar deviasi, maksimum, dan minimum dari masing-masing data sampel (Ghozali, 2006). Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali, 2006). Analisis ini akan memberi penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian yaitu Karakteristik Pemerintah Daerah dan kepatuhanpengungkapan pada laporan keuanganPemerintah Daerah kabupaten/kota di Lampung.

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2006). Untuk menguji data yang berdistribusi normal akan digunakan alat uji normalitas, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov.

Uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Kelebihan dari uji Kolmogorov-Smirnovini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Data dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi variabel dependen memiliki nilai signifikansi lebih dari 5%. Data penelitian yang baik adalah yang berdistribusi secara normal.

3.6.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2005). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara independen. Jika variabel independen saling korelasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model, peneliti akan melihat *Tolerance* dan *Variance Inflation Factors* (VIF) dengan alat bantu program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* < 0.5 atau sama dengan nilai VIF > 10 . Bila ternyata dalam model terdapat multikolinieritas, peneliti akan mengatasi hal tersebut dengan transformasi variabel. Transformasi variabel merupakan salah satu cara mengurangi hubungan linier di antara variabel independen. Transformasi dapat dilakukan dalam bentuk logaritma natural dan bentuk *first difference* atau delta (Ghozali, 2005).

3.6.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data *cross section* (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2005). Pengujian ada

tidaknya masalah autokorelasi, peneliti akan menggunakan uji *Run test* dengan alat bantu SPSS. Menurut Ghozali (2005), jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi autokorelasi baik positif atau negatif.

3.6.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Sebuah model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai data yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Kebanyakan data *cross section* mengandung situasi heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, atau besar) (Ghozali, 2005). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam model, peneliti akan menggunakan uji Glejser dengan bantuan program SPSS. Apabila koefisien parameter beta > 0.05 maka tidak ada masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).

3.7 Model Regresi.

Pengujian ini untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak (*fit*) untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan dengan alat bantu program SPSS versi 21.0. Kriteria pengujiannya adalah seperti berikut ini.

1. H_0 diterima dan H_a ditolak yaitu apabila $p\ value > 0.05$ atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai *alpha* 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini tidak layak (*fit*) untuk digunakan dalam penelitian.
2. H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu apabila $p\ value > 0.05$ atau bila nilai signifikansi kurang dari nilai *alpha* 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini layak (*fit*) untuk digunakan dalam penelitian.

3.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 2003). Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{ SIZE} + \beta_2 \text{ AGE} + \beta_3 \text{ SKPD} + \beta_4 \text{ IR} + e$$

Keterangan Regresi Berganda

Simbol	Keterangan
Y	Tingkat Pengungkapan
SIZE	Ukuran Pemerintah Daerah
AGE	Umur Pemerintah Daerah
SKPD	Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah
IR	<i>Intergovernmental Revenue</i>
A	Konstan
β_1, \dots, β_4	Koefisien Regresi
E	Error

3.8 Pengujian Model

3.8.1 Analisis Determinasi (R²)

Pengujian ini untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk (R²) yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Jika dalam suatu model terdapat lebih dari dua variabel independen, maka lebih baik menggunakan nilai *adjusted R²*.

3.8.2 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. Sebagai contoh, kita menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05), jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.8.3 Uji-t

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom sig (*significance*). Jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.9 Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis dapat dilihat dari *parameter estimates* di mana terdapat pengaruh dari masing-masing variabel terikat. *Parameter estimates* dapat dilihat melalui koefisien regresi. Koefisien regresi dari tiap variabel-variabel yang diujimenunjukkan bentuk hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas (*sig*). Apabila terlihat angka signifikan lebih kecil dari 0,05 maka koefisien regresi adalah signifikan pada tingkat 5% maka berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan

terhadap terjadinya variabel terikat. Begitu pula sebaliknya, jika angka signifikansi lebih besar dari 0,05 maka berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat.